

Perkembangan Sekolah Muhammadiyah di Surakarta Pada Tahun 1920-1970

*The Development of Muhammadiyah School in Surakarta in 1920-
1970*

DOI 10.18196/AIJIS.2019.0107.302-327

MOHAMAD ALI

Pendidikan Agama Islam (PAI), Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: ma122@ums.ac.id

ABSTRACT

Discourse about the history of the local Muhammadiyah is a rare and challenging area of study. This research seeks to trace the beginning and development of Muhammadiyah at the local level, specifically aimed to: a) describing the Islamic struggle in Surakarta prelude of the emergence of Muhammadiyah in this city, b) describing gerak langkah Muhammadiyah schools in Surakarta during 1920-1970, and c) analyze the style of development of the Muhammadiyah school that grew in this city. To examine and answer the above objectives, researcher used a socio-historical method with a multidisciplinary approach. This research succeeded in finding the following things. First, before the emergence of Muhammadiyah in Surakarta, the Islamic struggle was engulfing the city which was marked by the pioneering of the Mambaul Ulum Kasunanan madrasa in 1905 by the Kauman-Jamsaren axis and the Laweyan merchant axis establishing the Sarekat Dagang Islam (SDI) in 1911, the emergence of Muhammadiyah giving a new color to modernism with a touch of religious reform. Second, based on the tendency that emerged, the steps of the Muhammadiyah school in Surakarta during the period 1920-1970 can be divided into three periods, namely: the pioneering period of 1920-1942, the search for identity of 1942-1957, and the growth period of 1957-1970. Finally, the mode of development of Muhammadiyah schools in Surakarta follow the Yogyakarta pattern, namely by establishing more schools, not the Minangkabau pattern which establishes madrasas.

Keywords: Muhammadiyah education, school development, SATV, Surakarta

ABSTRAK

Diskursus tentang sejarah Muhammadiyah lokal merupakan wilayah kajian yang langka dan menantang. Penelitian ini berupaya melacak awal mula dan

perkembangan Muhammadiyah di tingkat lokal, secara rinci bertujuan untuk: a) melukiskan pergumulan Islam di Surakarta menjelang munculnya Muhammadiyah di kota ini, b) mendeskripsikan gerak langkah sekolah Muhammadiyah di Surakarta selama kurun 1920-1970, dan c) menganalisis corak pengembangan sekolah Muhammadiyah yang tumbuh di kota ini. Untuk menelaah dan menjawab tujuan di atas, peneliti menggunakan metode sosio-historis dengan pendekatan multididipliner. Penelitian ini berhasil menemukan hal-hal berikut. Pertama, menjelang kemunculan Muhammadiyah di Surakarta, pergumulan Islam tengah melanda kota ini yang ditandai dengan perintisan madrasah *Mambaul Ulum* Kasunanan pada 1905 oleh poros Kauman-Jamsaren dan poros saudagar Laweyan mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 1911, kemunculan Muhammadiyah memberi warna baru modernisme dengan sentuhan reformasi keagamaan. Kedua, berdasarkan kecenderungan yang mengemuka, gerak langkah sekolah Muhammadiyah di Surakarta selama kurun 1920-1970 dapat dipilah menjadi tiga periode, yaitu: masa perintisan 1920-1942, masa pencarian identitas 1942-1957, dan masa pemekaran 1957-1970. Terakhir, corak pengembangan sekolah Muhammadiyah di Surakarta mengikuti pola Yogyakarta, yakni dengan lebih banyak mendirikan sekolah, bukan pola Minangkabau yang banyak mendirikan madrasah.

Kata Kunci: pendidikan Muhammadiyah, pengembangan sekolah, SATV, Surakarta

A. PENDAHULUAN

Titik keunggulan Muhammadiyah sebagai suatu organisasi kemasyarakatan (ormas) bukan pada besarnya jumlah anggota, tetapi terletak pada kuantitas dan kualitas amal usaha yang diselenggarakan. Amal usaha Muhammadiyah (AUM) merupakan manifestasi dan aktualisasi iman yang mengejawantah dalam kehidupan sosial. Kesadaran teologis inilah yang melahirkan ketetapan bahwa syarat berdirinya suatu ranting, harus mempunyai amal usaha yang secara kongkrit dapat digunakan sebagai wahana penyiaran dan pengajaran Islam. Pada umumnya mendirikan lembaga pendidikan lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu, perluasan gerak dan penambahan jumlah ranting identik dan berbanding lurus dengan peningkatan kuantitas dan perluasan sekolah Muhammadiyah. Keberadaan sekolah Muhammadiyah di suatu daerah mencerminkan eksistensi persyarikatan. Ringkasnya, Muhammadiyah bukan sekedar ormas "papan nama", tapi benar-benar memiliki aktivitas kongkrit yang bisa dirasakan dan mencerahkan kehidupan rakyat.

Muhammadiyah berdiri di Yogyakarta pada 18 Nopember 1912, selama 5 tahun pertama merupakan organisasi lokal. Memasuki tahun 1917

gerakan yang dicetuskan K.H. Ahmad Dahlan (selanjutnya, ditulis Kyai Dahlan), mulai diterima umat Islam di luar daerah¹. Deliar Noer menyebut tahun-tahun ini merupakan era perluasan Muhammadiyah ke luar Yogyakarta². Salah satu daerah yang sejak awal menerima gagasan pembaharuan Kyai Dahlan adalah Surakarta yang ditandai dengan berdirinya SATV (Sidiq-Amanah-Tabligh-Fathanah). SATV merupakan suatu perkumpulan lokal pra-Muhammadiyah yang berdiri di Surakarta pada 1918 atas prakarsa Haji Misbach (1876-1924). Awalnya terjadi tarik-menarik yang demikian keras dalam memilih jalan menuju “Islam sejati”; apakah melalui jalan politik, atau jalan kultural. Pergolakan itu mereda seiring peralihan pimpinan SATV dari Haji Misbach ke Kyai Moechtar Boechari (1899-1926) pada 1920³. Sejak itu kegiatan dan orientasi gerakannya berkiblat pada Muhammadiyah di Yogyakarta, dan SATV bertransformasi menjadi Muhammadiyah Surakarta yang diresmikan Kyai Dahlan pada tanggal 25 Januari 1922⁴.

Dari tinjauan historis selintas di atas dapat diketahui bahwa, jejak Muhammadiyah lokal di kota Surakarta sudah berlangsung satu abad. Jejak historis yang panjang ini belum memperoleh perhatian yang memadai dari kalangan sejarawan dan analis sosial, sehingga sampai saat ini belum ada kajian ataupun publikasi yang agak memadai tentang gerakan Muhammadiyah lokal di Surakarta. Sekedar contoh, disertasi James L. Peacock⁵ yang menggali gerakan Muhammadiyah dekade 1970 di Yogyakarta menambahkan tinjauan selintas tentang Muhammadiyah lokal di Makasar, Ternate, Bima, Pandang Panjang, dan Pekajangan dalam rangka menemukan pola-pola gerakan lokal Muhammadiyah. Tetapi karya antropologis yang bagus ini tidak menampilkan kiprah Muhammadiyah di Surakarta.

Pengkajian tentang ikhwal Muhammadiyah dan corak gerakannya di tingkat lokal dalam pendidikan dirintis Alfian⁶. Dia menemukan bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah di Jawa dan Minangkabau menampilkan pola berbeda; di Jawa (baca: Yogyakarta) lebih banyak mendirikan model sekolah, sedangkan di Minangkabau lebih dominan model madrasah. Tambahan pula, gerakan Muhammadiyah di Minangkabau lebih bernuansa politik dan berpapasan langsung dengan gerakan komunisme. Sementara itu, pola gerakan Muhammadiyah di Yogyakarta tetap bersifat keagamaan dan lebih banyak berpapasan dengan kalangan Islam tradisional.

Meskipun belum ada studi yang secara khusus mengkaji gerakan Muhammadiyah di tingkat lokal Surakarta, tetapi ada beberapa kajian tentang gerakan sosial di Surakarta yang sedikit menyinggung perkumpulan pra-Muhammadiyah-SATV. Takashi Shiraishi⁷ melihat aktivitas SATV tidak banyak berbeda dengan proyek Muhammadiyah di Yogyakarta, seperti: mengadakan tabligh, mendirikan sekolah agama moderen. Namun ada dua hal yang membedakan. Pertama, Muhammadiyah menempati posisi strategis di tengah-tengah masyarakat keagamaan di Yogyakarta, sedang SATV dipimpin pedagang batik muslim saleh. Kedua, militansi Muhammadiyah digerakkan oleh keyakinan bahwa bekerja untuk Muhammadiyah berarti hidup sebagai muslim sejati. Sedangkan militansi mubaligh SATV berangkat dari keinginan membuktikan keislaman melalui perbuatan, bukan sekedar kata-kata.

Pernyataan Shiraishi di atas menarik untuk dikaji lebih lanjut dan bisa menjadi titik awal untuk melihat corak gerakan Muhammadiyah lokal di Surakarta. Berbeda dengan pandangan Shiraishi di atas, sumber dari internal Muhammadiyah Surakarta menyebutkan bahwa alasan utama SATV berdiri didorong oleh kebutuhan untuk mempelajari agama Islam secara teratur, lebih mendalam, dan disentuh dengan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat. Kyai Dahlan dinilai sebagai tokoh agama yang tepat untuk mengisi kebutuhan itu dipilih menjadi guru sekaligus mentor mubaligh SATV.

Terlepas dari perbedaan pandangan atas corak gerakan Muhammadiyah lokal Surakarta. Hal yang patut digarisbawahi adalah, keberhasilan Muhammadiyah Surakarta dalam mengembangkan pendidikan. Menjelang berakhirnya penjajahan Belanda mampu mendirikan lembaga pendidikan yang berkualitas, salah satunya adalah HIK (*Hollandsch Inlandsche Kweekschool*) Muhammadiyah yang menjadi kiblat pendidikan guru pada masan itu⁸. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Muhammadiyah Surakarta memiliki perhatian yang besar terhadap masalah pendidikan. Oleh karena itu, kajian atas gerak langkah sekolah Muhammadiyah di Surakarta mendesak dilakukan.

Secara garis besar penelitian ini memfokuskan pada tiga permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana situasi sosial dan pendidikan Islam kota Surakarta sebagai konteks gerakan menjelang munculnya Muhammadiyah; Kedua, bagaimana proses perkembangan dan lika-liku pergumulan sekolah Muhammadiyah di Surakarta selama kurun

1920 sampai 1970

Alur pembahasan selanjutnya diarahkan untuk menjawab permasalahan di atas. Setelah bagian pendahuluan, pembahasan diarahkan untuk merekonstruksi situasi Islam di Surakarta menjelang munculnya Muhammadiyah. Kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan perkembangan sekolah Muhammadiyah yang dipilah menjadi tiga periode, yaitu masa perintisan, masa pencarian identitas, dan masa pemekaran. Terakhir, menganalisis corak atau ciri khas pengembangan sekolah Muhammadiyah di Surakarta.

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan, dapat diketahui bahwa penelitian ini bersifat historis karena berupaya untuk merekonstruksi peristiwa yang telah berlangsung di masa yang lalu. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang cara kerjanya bertumpu pada empat kegiatan, yaitu pengumpulan sumber dan bahan-bahan tertulis, menyingkirkan bagian-bagian yang tidak otentik, menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya, dan menyusun kesaksian menjadi suatu penyajian yang bermakna⁹.

Menimbang permasalahan yang dikaji begitu kompleks, maka pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin¹⁰, yaitu pendekatan sosiologis karena berkaitan dengan kompleksitas peristiwa-peristiwa dan perubahan sosial, pendekatan politik untuk melihat bagaimana perubahan kekuasaan kemudian mempengaruhi arah pengembangan pendidikan.

B. PERGOLAKAN ISLAM DI SURAKARTA MENJELANG MUNCULNYA MUHAMMADIYAH

Kerangka konseptual H.A.R. Gibb¹¹ dalam membaca dunia Islam modern, kemudian dipinjam A. Mukti Ali¹² untuk membaca Islam Indonesia pada permulaan abad ke-20, tetap relevan sebagai pisau analisis untuk membedah situasi sosial Surakarta menjelang munculnya Muhammadiyah. Dalam pandangan Gibb dan Ali, latar belakang munculnya gerakan pembaharuan Islam didorong oleh lima faktor: 1) tidak bersihnya kehidupan agama Islam; 2) lembaga pendidikan Islam berjalan tidak efisien; 3) aktivitas misi Katolik dan Protestan semakin gencar; 4) sikap acuh kaum intelegensia (priyayi) terhadap agama Islam; dan 5) keterbelakangan umat Islam akibat penjajahan. Dari lima faktor tersebut, dapat diringkaskan menjadi dua, yaitu keadaan internal umat dan lembaga Islam yang terbelakang, dan faktor eksternal berupa politik kolonial yang membelenggu Islam dan

agresifitas misi maupun zending di tengah-tengah masyarakat yang beragama Islam.

Ada tiga hal yang relevan dan perlu pembahasan lebih lanjut, yaitu: kehidupan keagamaan umat Islam, keadaan pendidikan Islam, dan politik pendidikan penjajah. Pembahasan dimulai dengan politik kolonial, yang berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan atas negeri jajahan. Kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia (baca: Hindia Belanda) beragama Islam dan tidak pernah rela dijajah membuat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda tidak pernah surut. Untuk meredam perlawanan, pada awal abad ke-20 terbit politik etis dan rumusan politik Islam Hindia Belanda yang mengagendakan peluasan sekolah Belanda (Barat) kepada lapisan elit penduduk pribumi (baca: kaum priyayi). Pendidikan Barat diproyeksikan sebagai jembatan penghubung kaum kolonialis Belanda dengan penduduk pribumi Hindia Belanda.

Dihadapkan pada tantangan demikian, umat Islam Surakarta tidak mau menyerah dengan keadaan dan malah berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan melakukan perlawanan. Setidaknya ada dua bentuk perlawanan yang dilakukan kaum santri Surakarta, yaitu pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan kaum santri kraton kasunan di Kauman-Jamsaren dengan mendirikan madrasah *Mambaul Ulum* tahun 1905¹³ dan upaya pemberdayaan ekonomi kaum pribumi yang diprakarsai santri saudagar di kampung batik Laweyan dengan mendirikan perkumpulan Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1911, satu tahun kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI)¹⁴.

Berdasarkan data tersebut, gerakan pembaharuan Islam yang melancarkan lima agenda gerakan, yaitu: 1) membersihkan Islam dari pengaruh dan kebiasaan bukan Islam; 2) mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern; 3) mereformulasi ajaran dan pendidikan Islam; 4) mempertahankan Islam dari serangan luar; dan 5) melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan, sudah muncul di Surakarta sejak awal abad ke-20. Dengan demikian, berdirinya madrasah *Mambaul Ulum* dan organisasi SDI lebih awal daripada berdirinya pergerakan Muhammadiyah di Yogyakarta.

Embrio Muhammadiyah di Surakarta berawal dari pendirian perkumpulan pra-Muhammadiyah bernama SATV (Sidiq-Amanah-Tabligh-Vathanah) pada 1918, dan pada 25 Januari 1922 SATV bertransformasi menjadi Muhammadiyah cabang Surakarta. Dari sini dapat dilihat bahwa

SATV bukanlah organisasi pertama yang memelopori pembaharuan pendidikan Islam, karena peran itu dimainkan oleh kaum santri (abdi dalem pangulon) kraton Kasunan di Kauman yang ditopang kepemimpinan Pondok Pesantren Jamsaren¹⁵. Pun dalam pembentukan organisasi bercorak modern pelopornya adalah kaum santri saudagar Laweyan, dipimpin H. Samanhudi di dukung oleh H. Bakri dan Martodarsono. Ringkasnya, sebelum matahari Muhammadiyah terbit di tepi suangai bengawan Solo, telah muncul inisiatif melakukan gerakan pembaharuan Islam.

Dengan kata lain, kehadiran SATV berada di tengah-tengah pluralitas gerakan pembaharuan Islam di Surakarta. Meskipun tidak sebagai pelopor, tetapi kehadiran SATV semakin memperkuat kedudukan gerakan pembaharuan Islam di Surakarta. Keadaan ini berbeda dengan situasi di Yogyakarta, karena Muhammadiyah berperan sebagai pelopor sekaligus lokomotif gerakan pembaharuan Islam dalam bidang pendidikan dan sosial.

Baik poros Islam Kauman-Jamsaren maupun poros Islam Laweyan bercorak modernis karena berusaha menghadirkan kembali Islam dalam konteks kemoderenan, tetapi tidak bercorak reformis karena belum ada upaya untuk memperbaharui corak pemahaman Islam¹⁶. Dikatakan bersifat modernis karena kehadiran madrasah *Mambaul Ulum* merupakan upaya modernisasi pesantren sebagai jawaban ulama untuk kebutuhan pegawai keagamaan yang mampu menguasai agama Islam sekaligus mampu bekerja secara profesional sebagai pejabat keagamaan.

Dalam pola yang sama, berdirinya Sarekat Islam menunjukkan upaya modernisasi kelembagaan Islam dalam bidang ekonomi dan politik agar kaum pribumi mampu melakukan emansipasi dan berdiri sejajar dengan dengan orang-orang Eropa-Belanda maupun Timur Asing (China dan Arab). Meskipun telah ada upaya melakukan modernisasi lembaga Islam, namun sejauh itu belum ada upaya untuk melakukan pembaharuan cara pemahaman Islam baik melalui upaya pemurnian ajaran (purifikasi) maupun dinamisasi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa baik poros Islam Kauman-Jamsaren maupun poros Islam Laweyan telah melakukan kerja-kerja modernisasi institusi Islam dalam bidang pendidikan, ekonomi dan politik. Namun demikian mereka belum melangkah lebih jauh dalam kerja-kerja reformasi pemahaman keagamaan Islam. Kekosongan ini kemudian diisi oleh SATV, suatu perkumpulan pra-Muhammadiyah yang berusaha

memodernisasi sekaligus mereformasi Islam¹⁷.

Setelah merekonstruksi situasi sosial dan pendidikan Islam menjelang berdirinya Muhammadiyah, bagian selanjutnya memfokuskan pada pembahasan proses kelahiran dan perkembangan sekolah Muhammadiyah. Perlu ditandaskan bahwa yang dikaji di sini terbatas pada sekolah Muhammadiyah. Ini artinya perkembangan sekolah aisyiyah maupun kursus-kursus Islam sebagai bentuk pendidikan Islam non-formal tidak dibicarakan. Diperlukan suatu pengkajian tersendiri atas lembaga-lembaga tersebut.

C. GERAK LANGKAH SEKOLAH MUHAMMADIYAH DI SURAKARTA 1920-1970

Meskipun proses transformasi SATV menjadi Muhammadiyah cabang Surakarta berlangsung pada 1922, namun setelah Misbach lengser dan diganti Kyai Moechtar Boecheri pada 1920, orientasi kegiatan dalam bidang sosial dan pendidikan mulai digarap serius. Oleh karena itu, tahun 1920 layak dijadikan titik awal perintisan sekolah Muhammadiyah. Sementara itu, tahun 1970 dijadikan tonggak akhir pembahasan ini, karena pola sekolah Muhammadiyah di Surakarta sudah menemukan formulasinya. Dengan demikian, rentang waktu 1920 sampai 1970 merupakan periode formatif yang menentukan corak dan eksistensi sekolah Muhammadiyah pada masa-masa berikutnya.

Untuk memahami secara rinci dinamika corak sekolah Muhammadiyah dalam suatu kurun waktu, pembahasan dibagi menjadi tiga periode, yaitu: masa perintisan (1920-1942), masa pencarian identitas (1942-1957), dan masa pemekaran. Ciri yang menonjol pada masa perintisan (1920-1942) adalah, usaha keras mendirikan sekolah Muhammadiyah, sekalipun fasilitas sangat terbatas dan berjalan seadanya. Kegigihan ini didorong oleh semangat untuk mencerdaskan kaum pribumi, menggelorakan dakwah melalui sekolah, dan upaya merebut kemerdekaan dengan jalan mencerdaskan kehidupan bangsa pribumi.

Masa pencarian identitas (1942-1957) dihadapkan pada transisi dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, wawasan nasionalisme sekolah Muhammadiyah bukan lagi untuk merebut kemerdekaan, tetapi lebih ditekankan pada nasionalisme yang diorientasikan untuk mengisi kemerdekaan dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam suatu negara kesatuan republik Indonesia.

Masa pemekaran/pengembangan (1957-1970) ditandai proses transisi dari rezim Orde Lama yang menjadikan politik sebagai panglima, ke rezim Orde Baru yang menekankan pada pembangunan ekonomi. Di tangan Orde Baru yang menekankan pada pembangunan ekonomi dengan sendirinya masalah pendidikan mendapat perhatian. Dalam suasana kebangsaan demikian, sekolah Muhammadiyah menemukan momentum untuk mekar dan berkembang sedemikian rupa sehingga pola sekolah Muhammadiyah telah menemukan formatnya.

Untuk memberi gambaran yang lebih terperinci, dalam pembahasan tiap-tiap periode perkembangan disertakan data-data kuantitatif tentang keadaan sekolah Muhammadiyah. Meskipun data yang berhasil diperoleh tidak memadai, namun data-data tentang keadaan sekolah di setiap periode cukup memadai untuk menggambarkan keadaan Sekolah Muhammadiyah di Surakarta.

1. Masa perintisan 1920-1942

Masa perintisan dimulai sejak sekolah "Muhammadiyah", lebih tepat disebut sekolah SATV, untuk pertama kali berdiri. *HIS Met Quran* Mangkunegaran berdiri pada tahun 1920. Simpulan ini berdasarkan informasi bahwa saat itu SATV telah memiliki sekolah dan penjelasan keterangan keadaan sekolah Muhammadiyah (Tabel 1) yang menyebutkan bahwa pada tahun 1929 telah mengeluarkan anak kelas 7 sebanyak dua kali. Data sejarah ini membantah informasi yang sejauh ini menjadi rujukan resmi, bahwa SD Muhammadiyah 1 Surakarta berdiri tahun 1935. Sekolah ini telah berdiri pada 1920 dan pada 1935 terjadi perubahan nama dari *HIS Met Quran* Mangkunegaran menjadi HIS Muhammadiyah. Perubahan nomenklatur inilah yang kemudian ditetapkan menjadi tahun berdirinya SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Keputusan itu tidak tepat (baca: keliru), karena tanpa disadari telah memutus mata rantai sejarah masa sebelum 1935. Padahal, periode itu merupakan masa-masa kritikal yang bisa disebut sebagai masa *babad alas*.

Masa perintisan berakhir 1942, ketika pendudukan Jepang menggantikan penjanjahan Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang ini, sekolah-sekolah swasta dilarang beroperasi, termasuk sekolah Muhammadiyah di Surakarta. Jepang tengah berperang melawan sekutu, sehingga difokuskan pada pembentukan tentara dan tidak sedikit sekolah yang dijadikan markas militer, seperti HIK Muhammadiyah Surakarta di Kleco.

Perlu ditambahkan bahwa, pada masa ini wilayah Muhammadiyah Cabang Surakarta mencakup karsidenan Surakarta, yaitu: Klaten, Kartosuro, Kedunggudel, Boyolali, dan Sragen. Oleh karena itulah tampilan tabel 1 di bawah ini tidak terbatas di kota Surakarta, tetapi juga mencakup daerah-daerah di sekitar Solo Raya.

Tabel 1. Keadaan Sekolah Muhammadiyah di Surakarta tahun 1930

NO.	NAMA SEKOLAH	KEADAAN GURU	KEADAAN SEKOLAH
1	HIS Mangkoenegaran (Berdiri tahun 1920, merupakan cikal bakal SD Muhammadiyah 1 Ketelan- <i>per</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. R. Hadisoetirto sebagai kepala 2. R. Soekardjo 3. R. Soetantio 4. M. Soedjadi 5. M. Agoeslan 6. M. Soebadar 7. M. Mahdoem 8. Soepaja, guru agama 9. Mev. Soetiti, guru andwerken 	<p>Sekolah ini bersubsidi, rumah masih menyewa. Mengeluarkan anak dari kelas 7 baru dua kali. Mendapat <i>gelijkgesteld</i> pada 1 Agustus 1929. Penghabisan tahun ini mempunyai murid 220 anak.</p>
2	HIS Darpojoedan (Berdiri tahun 1925, merupakan cikal bakal SD Muhammadiyah 2 Kauman- <i>per</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mev. Koesban sebagai kepala 2. Mr. Soemastoeti 3. Mevr. Walidjah 	<p>Mempunyai kelas 4, rumah menyewa, belum subsidi, penghabisan tahun ini mempunyai murid 64 anak.</p>
3	Schakelschool Boedjanegaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Prawirowijoto sebagai kepala 2. M. Padmowidjojo 3. M. Soekandi 4. M. Soedarmo 5. M. Isa, guru agama 	<p>Mempunyai kelas 3, rumah menyewa, belum dapat subsidi, penghabisan tahun ini mempunyai 92 anak.</p>
4	Standaardschool Mangkoenegaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Soemowijoto sebagai kepala 2. M. Brotosoediro 3. M. Djokosoekarto 4. M. Wiknjoesiswo 5. M. Sahil, guru agama 6. M. Siswoedarmo, 1 Desember pindah Sampangan. 	<p>Mempunyai kelas 5, bersubsidi, rumah menyewa, mengeluarkan anak 21, penghabisan tahun ini mempunyai 188 anak.</p>

NO.	NAMA SEKOLAH	KEADAAN GURU	KEADAAN SEKOLAH
5	Standaardschool Kampungsewoe	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Soedarmo sebagai kepala 2. M. Tjokroatmojo 3. M. Martono 4. M. Asnawi, guru agama 	Mempunyai kelas 5, bersubsidi, rumah sendiri, mengeluarkan anak 6, penghabisan tahun ini mempunyai murid 174 anak.
6	Standaardschool Teloekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Soekidjo sebagai kepala 2. M. Soemarso 3. M. Soepadi 	Mempunyai kelas 4, rumah menyewa, penghabisan tahun ini mempunyai murid 97 anak.
7	Standaardschool Sampang	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Siswasoedarmo sebagai kepala 2. M. Soedarman 3. M. Daspandi 4. M. Djojosoerono 	Ini dulu kepunyaan Islamijah. Tetapi pada tahun ini diserahkan kepada Moehammadijah. Mempunyai kelas 3 buah. Rumah menyewa, penghabisan tahun ini mempunyai murid 87 anak.
8	Normaal School untuk guru bantu laki-laki	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Soedjadi sebagai direktur 2. R. Ng. Sastrosoebroto 3. R. Siswasoedrdjo 4. M. Isa, guru agama 	Pada ini waktu mempunyai dua kelas, rumah masih menyewa, pada ini waktu masih berdaja akan mendirikan rumah sendiri. Pada penghabisan ini tahun mempunyai murid 52 anak.
9	Cursus Goeroe Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Achmad sebagai leader 2. Djojosoekarto 3. M. Siswasoedarmo, guru agama 4. M. Asnawi, guru agama 	Mempunyai kelas 2. Penghabisan tahun ini mempunyai murid 19 anak.

NO.	NAMA SEKOLAH	KEADAAN GURU	KEADAAN SEKOLAH
10	Sekolah Desa Kedunggudel	1. M. Siswasoemarto	Mempunyai kelas 2, rumah sendiri. Penghabisan ini tahun mempunyai murid 96 anak.
11	Sekolah Desa Padjang	R. Atmomergono.	Mempunyai kelas 2, penghabisan ini tahun mempunyai murid 60 anak.

Sumber: *Berita Tahunan Moehammadijah Hindia* Timoer Tjabang Soerakarta Tahun 1930, hlm. 34-36. Ejaan nama orang dan nama tempat tetap, selain itu ejaan disesuaikan Bahasa Indonesia terbaru.

Tabel 1 di atas menggambarkan secara umum keadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Surakarta pada tahun 1930. Sayang sekali, sejauh ini belum diperoleh data tentang keadaan sekolah Muhammadiyah pada tahun-tahun lebih awal, demikian pula data tahun 1942 ketika penjajah Belanda berganti dengan pendudukan Jepang. Bila data-data statistik dalam dua masa itu berhasil diperoleh, maka gambaran tentang perkembangan masa perintisan (*babad alas*) semakin jelas.

Keadan sekolah Muhammadiyah pada periode ini masih seadanya, sebagaimana besar gedung/rumah masih menyewa. Sebagian besar guru-gurunya juga bukan lulusan dari sekolah guru. Sekolah Muhammadiyah masih sangat bersahaja dan seadanya, yang dipentingkan adalah proses belajar mengajar dapat berlangsung, meski sarana terbatas. Tujuan utamanya adalah agar anak-anak pribumi dari seluruh lapisan sosial dapat membaca dan menulis, sebagai wahana membebaskan diri dari kebodohan dan keterbelakangan. Dalam Al-manak Muhammadiyah tahun 1927-1928 pada bagian cara mengadakan sekolah, dikeluarkan seruan berikut:

Permoelaannja seadanja saja. Djika terpaksa, boleh tiada memakai mendja dan bangkoe seperti sekolah biasa. Tetapi moelailah, dan commite djangan bosen-bosen, sehingga petjat nyawanja dari pada badannja. Orang haroes mengingat bahwa tanah Hindia berteriak menangis minta pengadjaran agama Islam. Djika orang poera-poera tidak mendengar tangisnja, berdosa besar lah kita ini¹⁸.

Seruan di atas sangat tajam dan menukik, sebab persoalan pendidikan dan persekolahan bukan semata-mata dilihat sebagai masalah kemanusiaan dan kebangsaan, tetapi lebih dari itu, ia merupakan masalah teologis keagamaan. Kehadiran Sekolah Muhammadiyah sangat ditunggu-

lah untuk kaum pribumi.

Latar belakang inilah yang memantik pemahaman warga Muhammadiyah untuk mendirikan sekolah di manapun berada dan kapanpun ada kesempatan. Meski suatu daerah hanya terdiri dari beberapa gelintir orang, tetap berupaya keras untuk dapat mendirikan sekolah, sekalipun keadaannya sangat sederhana.

Kehadiran sekolah Muhammadiyah menjadi cara baru dalam berdakwah melalui jalur pendidikan. Sebelumnya, pengajian Quran dan pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan bagi rakyat pribumi¹⁹. Dengan demikian, sekolah Muhammadiyah memperluas aktivitas dakwah Islam dengan mengembangkan sekolah agama bercorak moderen. Hal itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, ataupun semi-kota (*sub-urban*), seperti Surakarta.

Ada dua perkembangan penting yang perlu dicatat dalam masa perintisan ini, yaitu kehadiran HIK dan pemantapan HIS Muhammadiyah Middel Quran Ketelan Surakarta²⁰. Pertama, mulai 5 Juli 1931 *Normaal School* ditransformasikan menjadi *Hoogere Inlandsche Kweekscholen* (HIK) bertempat di Kleco (sekarang menjadi markas Korem 074 Warastratama Surakarta. HIK Muhammadiyah dipimpin seorang direktur, bernama Ir. Marsito, dan guru-gurunya adalah Asnawi Hadisiwoyo, Soekamto Prodjo-tenojo, Djoko Rahardjo, Djajang Soegianto, dan Soeseno. Sekolah guru ini juga dilengkapi dengan asrama baik untuk calon guru lak-laki maupun perempuan.

Karena seluruh *Normaal School* pada tahun 1930 ditutup, maka murid-murid HIK Muhammadiyah juga datang daerah dari luar Solo, salah satu murid dari daerah Purbalingga adalah (panglima besar) jenderal Soedirman. Perkembangan yang pesat itu kemudian terhenti, karena pendudukan Jepang memaksa memberhentikan operasional sekolah swasta, termasuk HIK Muhammadiyah ini. Para pelopor dan pendiri antara lain Muljadi Djojmartono, Mohammad Abu Thoyib, Hadisunarto dan lain-lain.

Beralih ke perkembangan HIS Muhammadiyah *Middel Quran Ketelan* yang pada tahun 1930 mengalami kemajuan pesat, memakai bahasa Belanda sebagai pengantar dan mengajarkan ajaran Islam secara berke-majuan, sehingga siswanya berdatangan dari segala lapisan masyarakat, mulai dari kalangan rakyat jelata, priyayi, maupun saudagar. Melihat perkembangan sekolah yang demikian pesat, sementara ruang belajar sangat terbatas, maka pihak kraton Mangunegaran mewakafkan tanah

miliknya pada tahun 1941 untuk pendidikan Muhammadiyah. Tanah ini sekarang ditempat SD Muhammadiyah 1 Ketelan dan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta.

2. Masa pencarian identitas 1942-1957

Sebagaimana dijelaskan di atas, ketika pendudukan Jepang berlangsung 1942-1945 sekolah swasta berhenti beroperasi, tidak terkecuali sekolah Muhammadiyah di Surakarta. Setelah menghirup kemerdekaan 1945, sekolah swasta kembali menggelliat. Namun aktivitas pendidikan terhalang oleh keadaan perang, energi rakyat lebih tercurah pada perang untuk mempertahankan kemerdekaan sehingga pada awal kemerdekaan kegiatan kelaskaran lebih diutamakan dari pada bersekolah. Menginjak dekade 1950-an usaha menata kembali sistem persekolahan mendapat perhatian lebih serius.

Disahkan Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah merupakan landasan hukum penyelenggaraan persekolahan, dan pada tahun 1954 berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pengesahan itu merupakan titik balik dan perombakan total ideologi pendidikan kolonial menjadi ideologi pendidikan nasional. Jadi bukan sekedar perubahan nomenklatur atau penamaan sekolah dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia.

Bahwa perubahan penamaan jauh lebih mudah dari pada perombakan ideologi, tentu bisa dipahami. Perubahan nomenklatur sekolah harus dimaknai sebagai titik awal untuk merombak ideologi pendidikan dari kolonial menjadi ideologi pendidikan yang beridentitas nasional. Sekolah Muhammadiyah merupakan bagian dari, dan termasuk salah satu unsur, sistem pendidikan nasional yang harus mentransformasikan identitas dirinya.

Keberadaan sekolah swasta (partikelir) di zaman kolonial Belanda dipandang sebagai sekolah liar yang harus dibubarkan. Berbeda dengan itu, setelah merdeka sekolah swasta diakui keberdaannya sebagai salah satu pilar pendidikan nasional yang bersama-sama berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah partikelir adalah sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan partikelir. Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga Negara menganut sesuatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikelir. Sekolah-sekolah parti-

kelir yang memenuhi syarat-syarat dapat menerima subsidi dari pemerintah untuk pembiayaannya²¹.

Perubahan dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka menjadi tantangan baru bagi sekolah Muhammadiyah untuk merumuskan dan menemukan jati diri ataupun identitasnya. Sebelumnya, sekolah Muhammadiyah merupakan wahana menanamkan nasionalisme untuk merebut kemerdekaan. Setelah merdeka, pemupukan nasionalisme di sekolah Muhammadiyah diarahkan untuk mengisi kemerdekaan agar tercipta masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Tantangan kedua, pada zaman kolonial pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran sekolah Muhammadiyah yang menawarkan kurikulum umum plus pendidikan agama benar-benar menjadi daya tarik bagi mereka yang menginginkan pendidikan umum dan pendidikan agama sekaligus. Dengan kata lain, saat itu pendidikan agama menjadi salah satu identitas sekolah Muhammadiyah. Setelah merdeka, sekolah negeri diadakan pelajaran agama.

Demikianlah pada masa ini sekolah Muhammadiyah dihadapkan pada tantangan baru yang harus dijawab, yaitu merumuskan identitas dan jati dirinya di tengah-tengah sekolah negeri milik pemerintah maupun sekolah swasta yang semakin banyak. Oleh karena itu penyelenggaraan sekolah Muhammadiyah sedikit lebih tertata. Oleh karena itu, agenda Muhammadiyah bukan lagi sekedar mendirikan sekolah, tetapi mendirikan sekolah secara lebih memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Di masa inipun gairah warga Muhammadiyah untuk terus mendirikan sekolah belum terbandung, sehingga sampai tahun 1957 Muhammadiyah Surakarta berhasil mendirikan 21 sekolah mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Perlu ditambahkan bahwa berbeda dengan data tahun 1930an dimana cabang Surakarta mencakup daerah lain di sekitarnya, pada masa ini daerah-daerah lain sudah mandiri. Jumlah tersebut belum termasuk sekolah yang didirikan oleh organisasi otonom khusus Muhammadiyah, bernama Aisyiyah.

Tabel 2. Keadaan Sekolah Muhammadiyah di Surakarta Tahun 1957

NO.	NAMA SEKOLAH	SAMPAI KELAS	JUMLAH MURID	JUMLAH GURU	NAMA KEPALA GURU/SEKOLAH
1.	SMA ¹ A	III	72	28	Soekamto
2.	SMA B	III	101	-	Prodjotenojo
3.	SMA C	III	109	20	-
4.	SMA	III	222	22	Soekarno
5.		IV	452	30	Budiwirjo
6.	SGKP ²	III	102	16	Soediroatmodjo
7.	SGTK ³	IV	282	21	Sjafoat
8.	SGB ⁴ I	III	69	7	Soewidji
9.	SGB II	I	30	10	Sarwoko
10.	SGB III	III	325	12	Kartoatmojo
11.	SGM	II	50	54	Harun
12.	SKP ⁵	IV	171	-	Nj. St. Soetraso
13.	SKP	V	268	8	-
14.	Muallimien	III	294	14	H. Soejoeti
15.	SMP ⁶ I	III	200	10	Kirmadi
16.	SMP II	II	24	7	Hendrosisworo
17.	SMP IV	II	108	20	Sjatibi
18.	SGPD ⁷	VI	506	13	Zaenal Choiri
19.	SR ⁸ I	VI	210	5	Nasir Rosjidi
20.	SR II	I	35	2	Aminurroby
21.	SR III	I	30	2	Soedardjo
	SR IV				
			3.740	264	

¹ Sekolah Menengah Atas

² Sekolah Guru Kepandaian Putri

³ Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak

⁴ Sekolah Guru B

⁵ Sekolah Kepandaian Putri

⁶ Sekolah Menengah Pertama

⁷ Sekolah Guru Pendidikan Djasmani

⁸ Sekolah Rakyat

Sumber: *Muhammadiyah Setengah Abad* diterbitkan Muhammadiyah Bagian Tabligh Cabang Solo, tahun 1957, hlm. 60.

3. Masa pemekaran 1957-1970

Masa ini merupakan periode transisi dari orde lama ke orde baru yang diselingi pembrontakan Gerakan 30 September 1966 yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno lebih mengedepankan gegap gempita dunia politik, tapi mengabaikan kesejahteraan rakyat. Keresahan rakyat memuncak dengan meletusnya G 30 S PKI yang berusaha mengganti dasar Negara Pancasila dengan ideo-

logi komunisme dan menepikan agama dalam kehidupan berbangsa.

Kegagalan G.30 S/PKI menandai tumbangnya pemerintahan orde lama dan munculnya orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Dia berusaha melaksanakan pembangunan secara terencana dengan mengedepankan pembangunan ekonomi. Aspek pendidikan mendapat perhatian lebih serius, karena dinilai dapat meningkatkan kualitas manusia dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah orde baru mendorong kehidupan beragama yang mampu menopang pembangunan dengan jalan mewajibkan pendidikan agama di sekolah pemerintah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Dinamika nasional tersebut memberikan lahan yang subur bagi pertumbuhan sekolah Muhammadiyah di Surakarta. Pada masa ini pengembangan sistem pendataan sekolah Muhammadiyah berjalan lebih baik, sehingga dengan melihat tabel 3 dan tabel 4 kita dapat membaca keadaan sekolah secara lebih utuh. Mulai dari status sekolah, kepemilikan gedung, keadaan murid dan guru dalam rentang waktu 1968-1971. Perkembangan paling fenomenal terjadi pada peningkatan jumlah Sekolah Dasar, periode sebelumnya hanya 4 buah, tapi pada tahun 1971 sudah mencapai 22 buah.

Peningkatan ini nampaknya searah dengan meningkatnya jumlah ranting Muhammadiyah di Surakarta. Sebab, syarat mendirikan ranting harus memiliki amal usaha, dan mendirikan SD Muhammadiyah yang paling mungkin dilakukan. Meskipun begitu, harus segera ditambahkan bahwa tidak semua ranting memiliki SD, karena bisa jadi memiliki amal usaha di bidang lain, seperti majlis taklim atau panti asuhan yatim.

Membaca tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh lembaga pendidikan dasar (baca: SD) Muhammadiyah bernaung di bawah Kementerian Pendidikan nasional, dan tidak ada satu pun yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Semua berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan tidak ada satu pun yang berbentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI). Kalau mengikuti pendapat Karel A. Steenbrink, bahwa dalam konteks Indonesia, madrasah merupakan peralihan dari sistem pesantren ke sistem persekolahan di daerah pedesaan, maka fenomena ini menunjukkan Surakarta merupakan wilayah perkotaan.

Berkaitan dengan kualitas, SD Muhammadiyah di Surakarta pada masa ini hanya 3 sekolah yang berkualifikasi unggul (istilahnya bersubsidi atau berbantuan), yaitu: SD Muhammadiyah 1, 2, dan 3. Adapun 19 sekolah

yang lain berkualitas sedang (baca: swasta). Status kepemilikan gedung, ada 11 sekolah yang memiliki gedung sendiri, sedangkan 11 sekolah yang lain masih pinjam atau menyewa. Sekolah yang masih menyewa maupun pinjam berarti belum memiliki tempat belajar yang permanen.

Tabel 3. Keadaan SD Muhammadiyah di Surakarta tahun 1968 dan 1971

No.	Nama Sekolah	Tahun Berdiri	Status		Keadaan Sekolah					
			Sekolah	Gedung	Kelas		Murid		Guru	
					1968	1971	1968	1971	1968	1971
1.	SD M.1 Ketelan	1935	Subsidi	Sendiri	12	12	615	630	12	15
2.	SD M.2 Kauman	1937	Subsidi	Pinjam	6	6	255	268	8	8
3.	SD M.3 Nusukan	1958	Berbantu	Nyewa	11	11	444	520	11	13
4.	SD M.4 Kdg Sapi	1957	Swasta	Sendiri	6	6	177	273	6	6
5.	SD M.5 Kadipiro	1961	Swasta	Pinjam	6	6	101	133	6	6
6.	SDM.6 Kamp Sewu	1930	Swasta	Sendiri	6	6	214	259	6	7
7.	SD M.7 Joyosuran	1967	Swasta	Pinjam	2	5	41	160	2	6
8.	SD M.8 Jagalan	1962	Swasta	Sendiri	6	6	133	262	6	7
9.	SD M.9 Kottabarat	1963	Swasta	Sendiri	5	7	206	251	5	6
10.	SD M.10 Cokroningratan	1965	Swasta	Pinjam	4	6	71	73	4	3
11.	SD M.11 Mangkuyudan	1961	Swasta	Pinjam	5	6	169	230	5	6
12.	SD M.12 Palugunan	1960	Swasta	Pinjam	6	6	115	175	6	9
13.	SD M.13 M Bergulo	1962	Swasta	Pinjam	6	6	131	208	7	6
14.	SD M.14 Danukusuman	1968	Swasta	Sendiri	1	6	59	147	1	5
15.	SD M.15 Sumber	1968	Swasta	Pinjam	1	4	21	165	1	4
16.	SD M.16 Karangasem	1968	Swasta	Pinjam	-	4	-	53	-	2
17.	SD M.17 Sriwedari	1970	Swasta	Sendiri	-	2	-	71	-	1
18.	SD M.18 Sangkrah	-	Swasta	Sendiri	-	1	-	30	-	1
19.	SD M.19 Kemlayan	1970	Swasta	Sendiri	-	1	-	30	-	1
20.	SD M.20 Sidorejo	1970	Swasta	Sendiri	-	1	-	30	-	1
21.	SD M. 21 Baluwarti	1970	Swasta	Sendiri	-	1	-	45	-	1
22.	SD M 22 Sruhi	1966	Swasta	Sendiri	-	-	-	-	-	-

Sumber: 60 Th Muhammadiyah Mengabdikan-Buku tahunan 1972. Muhammadiyah Surakarta. hlm. 42

Beralih pada keadaan sekolah menengah sebagaimana dapat dibaca pada tabel 4 di bawah. Menarik untuk dicermati bahwa jumlah sekolah menengah atas lebih banyak (11 buah) dari pada sekolah menengah pertama (9 buah). Hal menarik kedua adalah, bahwa jumlah sekolah kejuruan (14 buah) jauh lebih banyak daripada sekolah umum (6 buah). Perlu ditambahkan bahwa sekolah kejuruan yang ada sebagian besar berupa sekolah guru (8 buah). Data ini menunjukkan bahwa, sejak awal Muhammadiyah memiliki perhatian yang besar kepada pendidikan guru.

Tabel 4. Keadaan Sekolah Menengah Muhammadiyah di Surakarta tahun 1968 dan 1971

No.	Nama Sekolah	Status		Keadaan Sekolah					
		Sekolah	Gedung	Kelas		Murid		Guru	
				1968	1971	1968	1971	1968	1971
1.	SMP M.1 Simpon	Subsidi	Sendiri	6	6	192	219	18	18
2.	SMP M. 2 Ps Kliwon	Swasta	Pinjam	3	3	45	32	12	13
3.	SMP M. 3 Simpon	Berbantu	Sendiri	6	6	275	239	15	15
4.	SMP M. 4 Nusukan	Swasta	Pinjam	-	3	-	49	-	10
5.	SMEP ¹ M.1 Ps Legi	Subsidi	Nyewa	3	6	78	135	10	7
6.	SMEP M. 2 Patangpuluhan	Swasta	Pinjam	1	3	18	80	10	14
7.	SGKP ² M.1 Kleco	Subsidi	Sendiri	6	7	95	160	15	18
8.	SGKP M. 2 Keprabon	Swasta	Nyewa	3	3	58	74	10	12
9.	PGAP ³ M. Mangkuyudan	Swasta	Nyewa	-	3	-	48	-	12
1.	SMA M. 1 Ketelan	Subsidi	Sendiri	11	11	354	325	27	29
2.	SMA M. 2 Ps Beling	Subsidi	Sendiri/Sewa	7	5	127	65	31	21
3.	SPG ⁴ M. 1 Simpon	Subsidi	Pinjam	11	5	405	139	20	16
4.	SPG M. 2 Ps Beling	Subsidi	Pinjam	5	5	176	169	19	16
5.	SMOA ⁵ M. Kottabarat	Subsidi	Sendiri	6	8	152	190	25	13
6.	SKKA ⁶ M. Jln Kartini	Subsidi	Pinjam	6	9	135	131	25	20
7.	SMEA ⁷ M. Ps Legi	Berbantu	Pinjam	4	6	125	309	21	21
8.	STM ⁸ M. Gading Kidul	Swasta	Pinjam	6	9	132	250	18	24
9.	Mualimin Mualimat	Swasta	Pinjam	6	6	88	154	19	18
10	PGA ⁹ M. Slompretan	Swasta	Pinjam	9	6	306	290	28	27
11	SPG M. Ps Legi	Swasta	Nyewa	-	4	-	105	-	17

¹Sekolah Menengah Ekonomi Pertama

² Sekolah Guru Kepandaian Putri

³ Pendidikan Guru Agama Pertama

⁴ Sekolah Pendidikan Guru

⁵ Sekolah Menengah Olahraga Atas

⁶ Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas

⁷ Sekolah Menengah Ekonomi Atas

⁸ Sekolah Teknik Menengah

⁹ Pendidikan Guru Agama

Sumber: *60 Th Muhammadiyah Mengabdikan-Buku tahunan 1972*. Muhammadiyah Surakarta. hlm. 43.

Dari data di atas dapat diketahui gambaran umum sekolah menengah Muhammadiyah di Surakarta. Dari 20 sekolah, ada 9 buah yang berstatus swasta, berbantu 2 sekolah, dan ada 9 buah yang berkualifikasi bersubsidi. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan sekolah menengah rata-rata bagus dan unggul karena lebih banyak yang bersubsidi dan berbantuan

dari pada yang berstatus swasta. Namun bila dilihat dari status kepemilikan gedung, hanya 6 buah sekolah yang gedungnya merupakan milik sendiri. Sementara yang menyewa atau pinjam jumlah sangat besar (14 buah). Selain itu, keadaan kelas, jumlah murid, dan jumlah guru relatif stabil.

D. CORAK PENGEMBANGAN SEKOLAH MUHAMMADIYAH DI SURAKARTA

Uraian secara kronologis tentang gerak langkah sekolah Muhammadiyah di Surakarta memberikan suatu pelajaran berharga bahwa dinamika, ataupun gerak langkah sekolah Muhammadiyah dalam suatu kurun waktu tertentu tidak bisa dilepaskan dari perubahan orientasi politik penguasa secara nasional. Demikianlah, kebijakan politik etis kolonial Belanda yang menjadikan pendidikan (baca: sekolah Barat) sebagai alat melanggengkan penjajahan, justru malah membangkitkan perlawanan dengan munculnya sekolah pribumi yang mendidik anak-anak bangsa dengan jiwa merdeka. Politik pendidikan Jepang yang mengedepankan kelaskaran dan latihan militer dengan sendirinya mematikan aktifitas pendidikan kaum pribumi dan ditutupnya sekolah-sekolah swasta (partikelir).

Setelah menghirup kemerdekaan, rezim Soekarno mengedepankan politik sebagai panglima. Jatuh bangunya kabinet secara cepat membuat pembangunan pendidikan agak terhambat. Ketika muncul rezim Soeharto yang mengedepankan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dengan sendirinya pengembangan pendidikan dan sekolah Muhammadiyah berjalan lebih mantap. Derap langkah sekolah Muhammadiyah di Surakarta ternyata juga tidak lepas dari dinamika politik nasional. Situasi yang stabil membuat pengembangan sekolah Muhammadiyah semakin terarah. Hal ini terlihat secara jelas dalam periode ketiga, yaitu masa pemekaran dan peluasan sekolah Muhammadiyah yang berkembang seiring stabilitas pemerintahan awal Orde Baru.

Meskipun pengaruh kebijakan politik pendidikan penguasa mempengaruhi pasang surut sekolah Muhammadiyah bukan berarti bahwa pengembangan sekolah Muhammadiyah bergantung kepada kebijakan pemerintah. Keadaan internal Muhammadiyah juga menjadi faktor yang sangat menentukan pasang surut Muhammadiyah. Terjadinya proses pemekaran sekolah Muhammadiyah yang signifikan pada periode ketiga tidak lepas dari akumulasi sumber daya manusia akibat kegagalan rehabilitasi partai Masyumi, sehingga tidak sedikit politikus Masyumi yang

kemudian terjun memperkuat gerakan dakwah Muhammadiyah.

Setelah memahami faktor-faktor yang menentukan pasang surut sekolah Muhammadiyah, diskusi selanjutnya berupaya memahami bagaimana corak pengembangan pendidikan Muhammadiyah di Surakarta. Di atas telah disinggung dua corak pengembangan pendidikan Muhammadiyah, yaitu pola Minangkabau yang lebih banyak mendirikan dan menekankan pada model madrasah di satu sisi, dan pola Yogyakarta yang lebih banyak mengembangkan model sekolah. Meminjam kategorisasi Alfian tersebut, corak pengembangan pendidikan Muhammadiyah di Surakarta lebih mendekati pola Yogyakarta, yakni lebih banyak mendirikan model sekolah. Sebagaimana Yogyakarta, satu-satunya model madrasah yang didirikan oleh Muhammadiyah Surakarta adalah madrasah Muallimin-Muallimat.

Setidaknya ada dua penjelasan mengapa pengembangan pendidikan Muhammadiyah Surakarta lebih memilih mengembangkan model sekolah dari pada madrasah. Pertama, Surakarta termasuk daerah perkotaan yang dekat kraton (baca: kekuasaan) dimana ekspansi pendidikan Barat sangat terasa, sehingga pilihan yang paling rasional adalah mengembangkan sistem sekolah dengan menambahi pelajaran agama Islam. Penjelasan kedua, basis sosial masyarakat Surakarta sebagian besar adalah saudagar dan pegawai (priyayi) dan secara kultural mayoritas terdiri atas muslim abangan, bukan muslim tradisional. Berdasarkan dua penjelasan tersebut dapat dipahami mengapa Muhammadiyah Surakarta lebih memilih model sekolah, bukan model madrasah.

E. PENUTUP

Dalam keseluruhan pembahasan di muka dapat ditarik simpulan bahwa perluasan Muhammadiyah ke luar Yogyakarta terjadi paska 1917. Di Surakarta berdiri SATV, perkumpulan lokal pra-Muhammadiyah pada 1918. Menjelang munculnya Muhammadiyah, pergolakan Islam tengah melanda kota ini yang ditandai dengan perintisan madrasah *Mambaul Ulum* Kasunanan pada 1905 oleh poros Kauman-Jamsaren dan poros saudagar Laweyan mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 1911, kehadiran Muhammadiyah memberi warna baru modernisme dengan sentuhan reformasi keagamaan.

Perkumpulan pra-Muhammadiyah lokal ini (baca: SATV) diprakarsai dan dipimpin Misbach selama dua tahun (1918-1920) kemudian diganti

Kyai Moechtar Boehari (1920-1926). Pergantian pimpinan ini pada urutannya mengubah orientasi gerakan SATV dari politik ke kultural yang menekuni masalah pendidikan, tabligh, sosial, dan kesehatan.

Sekolah Muhammadiyah selama periode 1920-1970 mengalami perkembangan pesat yang pada garis besarnya dapat dipilah menjadi tiga periode, yaitu: masa perintisan (1920-1942), masa pencarian identitas (1942-1957), dan masa pemekaran (1957-1970). Tantangan periode pertama adalah kolonialisme Belanda yang menggunakan pendidikan sebagai alat mempertahankan penjajahan. Berbeda dengan itu, kaum pribumi menggunakan pendidikan sebagai wahana pemerdekaan, tidak terkecuali sekolah Muhammadiyah. Dalam masa ini, sekolah Muhammadiyah digunakan wahana untuk menanam bibit-bibit intelektualisme, nasionalisme, dan paham agama berkemajuan. Sekolah Muhammadiyah menjadi arena pembebasan kaum pribumi dari konservatisme keagamaan, kemiskinan, keterbelakangan, dan kolonialisme.

Permasalahan mendasar yang dihadapi pendidikan pribumi paska kemerdekaan adalah pencarian identitas. Sistem pendidikan kolonial diganti menjadi sistem pendidikan nasional yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh unsur bangsa menjadi suatu negara kesatuan. Orientasi Sekolah Muhammadiyah pun berubah, bukan lagi sebagai arena perlawanan, tetapi lebih sebagai penguat dan perekat kesatuan bangsa. Dalam situasi demikian, Sekolah Muhammadiyah ditantang untuk menemukan kembali identitas dirinya di tengah-tengah taman pendidikan nasional yang terus berubah.

Ketika identitas diri sekolah Muhammadiyah mulai ditemukan, kemudian memasuki masa pemekaran yang diwarnai pergolakan politik yang memuncak dengan meletusnya G.30S PKI tahun 1965 yang menandai proses transisi kekuasaan dari Orda Lama (baca: Soekarno) yang berorientasi pada politik ke Orde Baru (Soeharto) yang berorientasi pada ekonomi. Pada masa ini sekolah Muhammadiyah di Surakarta tumbuh pesat, karena ditopang kepemimpinan yang kuat dan permintaan yang tinggi dari rakyat sehingga Surakarta dikenal sebagai kota pelajar.

Corak pengembangan sekolah Muhammadiyah di Surakarta mengikuti pola Yogyakarta yang ditandai dengan lebih banyak mendirikan model sekolah, bukan pola Minangkabau yang lebih menitikberatkan pada pendirian madrasah. Corak demikian ini nampaknya dibentuk oleh lingkungan perkotaan dan basis sosio-kultural pendukungnya adalah priyayi, saudagar,

dan mayoritas kaum abangan.

Berdasarkan simpulan dapat diketahui bahwa penelitian ini terbatas di Surakarta, dengan tema yang terbatas yakni masalah pendidikan, dan dalam rentang waktu yang terbatas pula, yaitu 1920-1970. Berangkat dari keterbatasan ini, masih terbuka peluang untuk penelitian selanjutnya, seperti penelitian sejarah Muhammadiyah lokal di daerah-daerah lain, pengkajian lebih lanjut tentang perkembangan Sekolah Muhammadiyah Surakarta paska 1970-an, bahkan penelitian tentang sejarah pendidikan non-formal dalam bentuk tabligh sama sekali belum terjamah.

CATATAN AKHIR

- 1 Mohamad Ali. 2017. *Paradigma pendidikan berkemajuan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, hlm. 177-220.
- 2 Deliar Noer. 1994. *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, hlm. 87
- 3 Mohamad Ali & Sifaul Arifin. 2015. *Matahari terbit di kota bengawan: Sejarah awal Muhammadiyah Solo*. Surakarta: Persatuan, hlm. 93.
- 4 Solichin Salam. 1965. *Muhammadiyah dan kebangunan Islam di Indonesia*. Jakarta: N.V. Mega, hlm. 61
- 5 James L. Peacock. 1978. *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*. Menlo Park, California: The Benjamin Cummings Publishing Company, hlm. 61-77. Buku ini telah tersedia versi bahasa Indonesia, James L. Peacock. 2016. *Gerakan Muhammadiyah memurnikan ajaran Islam di Indonesia*. Terj. Andi Makmur Makka. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, hlm. 77-98.
- 6 Alfian. 1989. *Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 180-298. Buku ini telah tersedia versi bahasa Indonesia, Alfian. 2010. *Politik kaum modernis*. Jakarta: Al-wasath, hlm. 2014-234.
- 7 Takashi Shiraisi. 1990. *An age in motion*. Itacha & London: Cornell University Press, hlm. 135-137. Buku ini telah tersedia versi bahasa Indonesia, Takshi Shiraisi. 2005. *Zaman bergerak*. Jakarta: Grafiti, hlm. 183-186.
- 8 Mochtar Buchori. 2007. *Evolusi pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press, hlm. 22; Mohamad Ali. 2019. *HIK Muhammadiyah Solo 1931-1942: Pendidikan guru pada zaman Hindia Belanda*. Suara Muhammadiyah Edisi 06/Th. Ke 104/16-31 Maret 2019, hlm 52-53.
- 9 Louis Gottschalk. 2008. *Mengerti sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UII Press, hlm 24.
- 10 Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: Gramedia, hlm 4.
- 11 H. A. R. Gibb. 1952. *Aliran-aliran modern dalam Islam*. Terj. L.E. Hakim. Jakarta: Tintamas, hlm. 41-42.
- 12 A. Mukti Ali. 1971. *Alam pikiran Islam modern di Indonesia dan modern Islamic*

- thought in Indonesia*. Yogyakarta: Nida, hlm. 13.
- 13 Ma'mun Puspongoro dkk. 2007. *Kauman religi tradisi dan seni*. Surakarta: Paguyuban Kampung Wisma Batik Kauman, hlm. 47.
- 14 APE Korver. 1985. *Sarekat Islam gerakan ratu adil*. Jakarta: Grafitipers, hlm. 11-42
- 15 Ali Darokah. 1983. *Pondok pesantren Jamsaren Solo dalam historis dan esensinya*. Surakarta: Ramadhani, hlm. 3-7; A. Basit Adnan. 1996. *Sejarah masjid Agung dan Gemelan Sekaten di Surakarta*. Surakarta: Mardikintoko, hlm. 118-119.
- 16 Mohamad Ali. 2019. "Gerakan Islam progresif Surakarta" dlm. *Solopos* 17 Nopember 2018.
- 17 Mohamad Ali. 2019. *Sufisme dalam pandangan kaum modernis awal, telaah pemikiran tawasuf Kyai Moechtar Boechari 1899-1926*. Jurnal Lektur Vol. 17. No. 1. 2019, hlm. 217-240.
- 18 Moehammadijah bagian Poestaka. *Almanak Moehammadijah 1346 (1927-1928)*. Djokakarta: Taman Pustaka Moehammadijah, hlm. 210.
- 19 Karel A. Steenbrink. 1984. *Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 151-160.
- 20 Muhammad Wasil Aziz. 1997. *Perjuangan Muhammadiyah Surakarta dalam pembaharuan pendidikan di Surakarta*. Surakarta: Skripsi UNS, hlm. 258.
- 21 Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 tentang *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah*, pasal 12, 13, dan 14
- 22 Sekolah Menengah Atas
- 23 Sekolah Guru Kepandaian Putri
- 24 Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak
- 25 Sekolah Guru B
- 26 Sekolah Kepandaian Putri
- 27 Sekolah Menengah Pertama
- 28 Sekolah Guru Pendidikan Djasmani
- 29 Sekolah Rakyat
- 30 Sekolah Menengah Ekonomi Pertama
- 31 Sekolah Guru Kepandaian Putri
- 32 Pendidikan Guru Agama Pertama
- 33 Sekolah Pendidikan Guru
- 34 Sekolah Menengah Olahraga Atas
- 35 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas
- 36 Sekolah Menengah Ekonomi Atas
- 37 Sekolah Teknik Menengah
- 38 Pendidikan Guru Agama

DAFTAR PUSTAKA

Sumber primer

- Almanak Moehammadijah 1346 (1927-1928)*. Djokakarta: Pengoeroes Besar Moehammadijah bg Taman Poestaka

- Berita Tahoenan Moehammadijah Hindia Timoer tahun 1927*. Djokjakarta: Pengoeroes Besar Moehammadijah
- Berita Tahoenan Moehammadijah Hindia Timoer tjabang Soerakarta tahun 1930*. Surakarta: Pengoeroes Moehammadijah Tjabang Soekarta.
- Moehammadijah bagian Poestaka. Almanak Moehammadijah 1346 (1927-1928)*. Djokakarta: Taman Poestaka Moehammadijah.
- Muhammadiyah setengah abad 1912-1957*. 1957. Surakarta: Moehammadijah bagian tabligh tjabang Solo, 1957.
- 60 tahun Muhammadiyah mengabdikan*. 1972. Surakarta: Muhammadiyah Daerah Kodya Surakarta.

Sumber-sumber lain

- Adnan, A. Basit. 1996. *Sejarah masjid Agung dan Gemelan Sekaten di Surakarta*. Surakarta: Mardikintoko.
- Ali, A. Mukti. 1971. *Alam pikiran Islam modern di Indonesia dan modern Islamic thought in Indonesia*. Yogyakarta: Nida.
- Ali, Mohamad. 2019. "HIK Muhammadiyah Surakarta: Pendidikan guru zaman Hindia Belanda 1931-1935" dlm. *Suara Muhammadiyah* Edisi 06/ Th 104/ 16-31 Maret.
- . 2019. *Sufisme dalam pandangan kaum modernis awal, telaah pemikiran tawasuf Kyai Moechtar Boechari 1899-1926*. *Jurnal Lektur* Vol. 17. No. 1. 2019.
- . 2018. "Gerakan Islam progresif Surakarta" dlm. *Solopos* 17 Nopember.
- . 2017. *Paradigma pendidikan berkemajuan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- . & Sifaal Arifin. 2015. *Matahari terbit di kota bengawan: Sejarah awal Muhammadiyah Solo*. Surakarta: Persatuan.
- Alfian. 1989. *Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- . 2010. *Politik kaum modernis*. Jakarta: Al-Wasath.
- Azis, Muhammad Wasil. 1997. *Perjuangan Muhammadiyah Surakarta dalam pembaharuan pendidikan di Surakarta*. Surakarta: Skripsi UNS.
- Buchori, Mochtar. 2007. *Evolusi pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Darokah, Ali. 1983. *Pondok Pesantren Jamsaren Solo dalam historis dan esensinya*. Surakarta: Ramadhani
- Gibb, H. A. R. 1952. *Aliran-aliran modern dalam Islam*. Terj. L.E. Hakim. Jakarta: Tintamas.
- Gottschalk, Louis. 2008. *Mengerti sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UII Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Korver, APE. 1985. *Sarekat Islam gerakan ratu adil*. Jakarta: Grafiti Pres.
- Noer, Deliar. 1994. *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Peacock, James. L. 1978. *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indo-*

- nesian Islam*. Menlo Park, California: The Benjamin Cummings Publishing Company.
- . 2016. *Gerakan Muhammadiyah memurnikan ajaran Islam di Indonesia*. Terj. Andi Makmur Makka. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Pusponegoro, Ma'mun dkk. 2007. *Kauman religi tradisi dan seni*. Surakarta: Paguyuban Kampung Wisma Batik Kauman.
- Salam, Solichin. 1965. *Muhammadiyah dan kebangunan Islam di Indonesia*. Jakarta: N.V. Mega.
- Shiaraisi, Takashi. 1990. *An age in motion*. Itacha & London: Cornell University Press.
- . 2005. *Zaman bergerak*. Jakarta: Grafiti.
- Steenbrink. 1984. *Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 tentang *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah*.

